

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. Menurut Rodger (1998:28) dalam Ratih (2013) terdapat banyak jenis wisata, salah satunya wisata edukasi yang merupakan program bagi wisatawan untuk mengunjungi berbagai tempat wisata dengan berfokus mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Contoh dari wisata edukasi adalah museum. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum menjelaskan museum adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Pengunjung terbesar pada tempat wisata edukasi adalah mahasiswa serta pelajar yang menggunakan kesempatan liburan untuk bersenang-senang serta memperoleh hal yang baru.

Hadirnya kebijakan diharapkan mampu membantu dalam mengarahkan pengembangan wisata edukasi yang lebih baik. Terlebih lagi, pada wisata edukasi diperlukan perhatian spesifik terkait informasi yang akan disampaikan dan

diperlihatkan kepada wisatawan. Menurut Pitana dan Diarta (2009:106), kebijakan merupakan arah atau pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta dituangkan dalam hal umum tentang tujuan pencapaian dan pedoman aksi oleh seluruh praktisi di dalam dan di luar pemerintah guna memenuhi harapan yang telah dirancang. Sedangkan, Fannel (1999) dalam Pitana (2009:106) mengungkapkan bahwa kebijakan pariwisata diartikan sebagai identifikasi serangkaian tujuan serta sasaran untuk membantu lembaga pemerintah dalam proses perencanaan industri pariwisata.

Afrizal, dkk (2018) telah melakukan penelitian pada obyek wisata unggulan Hapanasan, Rokan Hulu, Riau terkait implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rokan Hulu, hasil dari implementasi mengatakan bahwa belum optimalnya pengembangan pariwisata dilihat dari kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, sarana prasarana yang belum optimal, serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional. Studi lain dilakukan oleh Irawan (2015) terkait implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian tersebut, terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pariwisata, diantaranya komunikasi, partisipasi masyarakat dan kompetensi pelaksana kebijakan.

Temuan di atas menyoroti pentingnya peran implementasi kebijakan dalam mengetahui berbagai perihal implementasi kebijakan pariwisata yang dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan tujuan implementasi menurut Tachjan (2006:26) yaitu guna menjalin hubungan yang memungkinkan akibat

terwujudnya tujuan kebijakan publik atau tujuan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Salah satu daerah yang sedang dikembangkan dan dibangun kembali pariwisatanya adalah Kabupaten Purwakarta yang terletak di Jawa Barat. Sebagai kabupaten ke dua terkecil di Jawa Barat, Purwakarta mencoba membangun pariwisata lewat wisata edukasi yang dapat diperoleh dari beberapa museum yang ada. Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta perihal Penetapan Obyek Wisata yang berada di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta tahun 2019 menetapkan 4 obyek wisata edukasi yaitu Diorama Purwakarta, Diorama Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang, serta Diorama Nusantara. Hal ini juga dijelaskan oleh pihak Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya akan disebut Disporaparbud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta 2020-2029 tentang konsep pembangunan destinasi pariwisata pada pasal 10:1 yaitu konsep pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purwakarta merupakan gabungan diantara konsep pariwisata perkotaan serta wisata edukasi dengan pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata.

Pada umumnya wisata edukasi di Purwakarta dibuat dengan target pasar anak-anak sekolah serta mahasiswa yang menempuh pendidikan di Purwakarta. Dalam pengembangan wisata edukasi di Purwakarta tidak terlepas dari peran serta keterlibatan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disporaparbud Purwakarta dalam pengembangan wisata edukasi masih terdapat beberapa hal yang

harus diperbaiki, hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi dalam pengelolaan yang dipegang lebih dari satu pihak sehingga menyebabkan adanya miskomunikasi dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengembangan museum, saat ini museum di Purwakarta berada dinaungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan dalam proses promosinya Disporaparbud lebih banyak berperan aktif, selain itu keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penerapannya saat ini pada setiap museum hanya terdapat 2-3 orang, hingga pada proses penerapan kebijakan yang masih belum terarah pada wisata edukasi khususnya museum di Purwakarta.

Bersamaan dengan hal tersebut, sesuai dengan isu yang terdapat dalam RPJMD Purwakarta tahun 2018-2023 terkait potensi dan pengembangan pariwisata, penulis tertarik melakukan pengkajian untuk mengetahui implementasi pengembangan wisata edukasi yang sudah dilakukan oleh Disporaparbud Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu penelitian ini berjudul: **“Implementasi Pengembangan Wisata Edukasi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Purwakarta”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah mengetahui implementasi pengembangan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta dalam mengembangkan wisata edukasi khususnya pada museum- museum yang ada di Purwakarta yang dilihat dari empat variabel menurut George C Edwards (1980)

dalam Tachjan (2006) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau kecenderungan pemerintah dalam mendukung program yang sudah direncanakan dan struktur birokrasi dalam hal ini akan dijelaskan terkait *Standard Operating Procedure/SOP*.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan formal**

Secara formal, tujuan dari penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar sarjana di Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

#### **2. Tujuan Operasional**

Secara operasional, tujuan penelitian ini mengetahui implementasi pengembangan dalam hal keselarasan program dan kegiatan yang telah dibuat terhadap pelaksanaannya.

### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian, keterbatasan yang dialami oleh penulis ialah waktu penelitian serta adanya batasan untuk menemui berbagai pihak yang terkait dalam pengambilan data dikarenakan covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini serta kesulitan untuk mendatangi lokasi dikarenakan tutup akibat pandemi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang tentang wisata edukasi bagi dinas pariwisata.

2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian dan gambaran bagi para pemangku kepentingan baik pengelola dan pemerintah dalam membuat pengembangan wisata edukasi di Purwakarta.